



## Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Suyono<sup>1\*</sup>, Mayta Nur Azizah<sup>2</sup>, Taris Puteri Oktaviani<sup>3</sup>, Flavintus Risando<sup>4</sup>, Efrandi Arnoldus Sandur<sup>5</sup>, Ermelinda Wamul<sup>6</sup>, Marsela Keventina Iwas<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia

Alamat: Jl. Dukuh Menanggal XII, Dukuh Menanggal, Kec. Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60234

Correspondence author: [suyono@unipasby.ac.id](mailto:suyono@unipasby.ac.id)\*

**Abstract.** *The research aims to analyze the political behavior of the community in the Village Head Election (Pilkades) in Krembangan Village, Taman District, Sidoarjo Regency. The Regional Elections as a manifestation of people's sovereignty are an important object in understanding the political participation of the community at the village level. The research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews and participatory observation. The subject of the study is the people of Krembangan Village who are directly involved in the Pilkades. The results of the study show that the 2022 Regional Elections in Krembangan Village went smoothly, with active participation from residents who are eligible as voters. Of the 3,000 valid votes, the candidate with number 4, Sutrisno, received the most votes, namely 842 votes, followed by Damri (839 votes), M. Zaini Effendi (645 votes), Akhmad Umar (500 votes), and M. Suherman (174 votes). Factors that affect voting behavior include emotional relationships with candidates, candidates' religious understanding, and social environment. Education level and political awareness also affect participation. Some residents showed their support openly, while others voted privately but remained active. Although participation is quite high, there are still weaknesses such as low campaign quality and lack of public understanding of the candidate's visions and missions.*

**Keywords:** *Community Participation; Local Democracy; Political Behavior; Political Education; Village Head Election*

**Abstrak.** Penelitian bertujuan menganalisis perilaku politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo. Pilkades sebagai perwujudan kedaulatan rakyat menjadi objek penting dalam memahami partisipasi politik masyarakat di tingkat desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan observasi partisipatif. Subjek penelitian adalah masyarakat Desa Krembangan yang terlibat Pilkades secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkades tahun 2022 di Desa Krembangan berjalan lancar, dengan partisipasi aktif dari warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih. Dari 3.000 suara sah, calon dengan nomor urut 4, Sutrisno, memperoleh suara terbanyak yakni 842 suara, diikuti oleh Damri (839 suara), M. Zaini Effendi (645 suara), Akhmad Umar (500 suara), dan M. Suherman (174 suara). Faktor yang memengaruhi perilaku memilih antara lain hubungan emosional dengan calon, pemahaman keagamaan calon, dan lingkungan sosial. Tingkat pendidikan dan kesadaran politik juga berpengaruh terhadap partisipasi. Sebagian warga menunjukkan dukungan secara terbuka, sementara lainnya memilih secara tertutup namun tetap aktif. Meskipun partisipasi cukup tinggi, masih terdapat kelemahan seperti rendahnya kualitas kampanye dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap visi-misi calon.

**Kata kunci:** Demokrasi Lokal; Partisipasi Masyarakat; Pemilihan Kepala Desa; Pendidikan Politik; Perilaku Politik

### 1. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara demokrasi yang ditandai dengan kontestasi pemilihan umum. Seiring dengan sistem demokrasi tersebut, mendorong terbentuknya pemerintahan desa yang tidak terlepas dari adat istiadat serta kebiasaan masyarakat yang berpengaruh pada perilaku memilih masyarakat. Pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai salah satu bentuk implementasi demokrasi di tingkat lokal yang penting dalam sistem pemerintahan Indonesia (Ramadhani,

2017). Sebagai ujung tombak pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kepala desa memiliki peran strategis dalam mengelola sumber daya, memberikan pelayanan publik, serta mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa. Proses pemilihan kepala desa tidak hanya sekadar memilih pemimpin, tetapi juga merupakan sarana masyarakat untuk mengekspresikan hak politik mereka, memperkuat partisipasi publik, dan juga mendorong akuntabilitas dalam pemerintahan desa (Suyono dkk., 2024). Pemilihan kepala desa diatur peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini menunjukkan bahwa desa memiliki kedudukan yang penting dalam struktur pemerintahan Indonesia.

Pemilihan kepala desa adalah pesta rakyat, di mana pemilihan kepala desa dapat diartikan sebagai suatu kesempatan menampilkan orang-orang yang dapat melindungi kepentingan masyarakat desa. Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Pemerintah Indonesia, 2014), dalam Pasal 34 yang mengatur mekanisme pemilihan kepala desa secara demokratis dengan prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa melalui tahapan pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Untuk melaksanakan ini, maka dibentuk panitia pemilihan kepala desa yang bertugas melakukan penjurian dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon terpilih, melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa. Seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan ini menjadi tanggungan APBD kabupaten atau kota, menegaskan dukungan anggaran pemerintah daerah terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat desa.

Berdasarkan observasi sebelumnya, pemilih masih kurang memahami politik dan masih sangat rawan dipengaruhi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Kurangnya pengetahuan tentang kompetisi politik membuat pemilih seringkali kurang berpikir rasional dan hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek, yang akan dimanfaatkan tim sukses maupun pihak berkepentingan untuk memobilisasi massa. Perkembangan sistem politik dan demokrasi, khususnya pedesaan, menunjukkan kemajuan (Sholikhah, 2014). Hal ini terlihat dari tingkat antusiasme masyarakat yang cukup tinggi pada penyelenggaraan pemilihan kepala desa, mulai pendaftaran hingga saat hari pencoblosan tiba. Warga masyarakat menyambut demokrasi di tingkat desa dengan berbagai sikap dan perilaku. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya pada salah satu calon. Ada pula yang bersifat tertutup tetapi membuktikan partisipasinya dengan mendatangi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari tiba.

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di sana-sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon kepala desa yang kadang kurang dapat memenuhi

sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan calon pemimpin yang bersih dan berkualitas, baik segi kecakapan dan moral spiritualnya. Padahal itu penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis namun terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme. Pemilihan calon kepala desa memang membutuhkan waktu yang lebih panjang, partisipasi masyarakat, dan juga dukungan dari masyarakat agar berjalan dengan baik (Pratama, 2018). Sebagai calon kepala desa juga harus bersosialisasi dengan masyarakat, serta menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya tanpa membeda-bedakan warga yang lain (Rahmawati, 2016).

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting, dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, hubungannya dengan negara-negara berkembang. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan yang tepat untuk memenuhi kebijakan pemerintah (Widiyaningrum, 2020). Menurut Samuel P. Huntington, partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak untuk memengaruhi pembuatan keputusan pemerintah (Gustomy, 2017). Partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadis, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif. Sementara, untuk partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam pengelolaan negara (Wangga, 2018). Sebagai lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih muda dibandingkan dengan organisasi negara, dan baru ada di negara modern.

Surbakti dalam Sastroatmodjo menyebutkan dua variabel yang dapat memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan keyakinan politik terhadap pemerintah (Averus & Alfina, 2020). Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, ekonomi, maupun hak-hak mendapat jaminan sosial dan hukum. Selain itu, kewajibannya sebagai warga negara di dalam sistem politik maupun kehidupan sosial juga berpengaruh terhadap tinggi rendahnya suatu partisipasi politik. Kesadaran politik seseorang menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik di sekitarnya (Apriyani dkk., 2024). Sedangkan, keyakinan politik terhadap pemerintah menyangkut penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik kebijakan atau pelaksanaan pemerintahannya. Penilaian merupakan rangkaian kepercayaan, baik menyangkut pemerintah dipercaya atau tidak, maupun pemerintah dapat dipengaruhi atau

tidak. Jika mereka memandang pemerintah tidak dapat dipengaruhi dalam proses pengambilan keputusan politik, maka bagi mereka berpartisipasi secara aktif adalah hal yang sia-sia.

Kesadaran politik mencakup pengetahuan individu mengenai hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta pemahamannya terhadap sistem politik dan kondisi sekitarnya. Semakin tinggi kesadaran politik seseorang, maka semakin besar kemungkinan berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan politik. Sementara itu, keyakinan politik berkaitan persepsi dan sikap seseorang terhadap kemampuan pemerintah menanggapi dan mengakomodasi aspirasi publik. Jika seseorang merasa bahwa pemerintah dapat dipercaya dan proses pengambilan keputusan bersifat inklusif, maka partisipasi politik cenderung meningkat. Sebaliknya, jika seseorang merasa pemerintah bersifat tertutup dan tidak responsif, maka semangat untuk berpartisipasi akan menurun, bahkan mengarah apatisisme politik. Partisipasi politik menjadi penting karena masih terdapat ketimpangan dalam pendidikan politik, serta kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Partisipasi masyarakat di pemilihan kepala desa, tidak hanya mencerminkan antusiasme terhadap demokrasi di tingkat lokal, tetapi juga mencerminkan kesadaran politik yang berkembang seiring meningkatnya pendidikan dan akses informasi (Rosit dkk., 2024). Namun, berbagai hambatan struktural dan kultural seperti politik uang, dominasi elite lokal, dan rendahnya transparansi masih menjadi tantangan yang dihadapi.

Partisipasi politik bukan tindakan yang berdiri sendiri dari warga negara sebagai wujud cinta tanah air semata (Widyatama & Suhari, 2023), melainkan hasil dari proses panjang yang melibatkan kesadaran individu, lingkungan sosial, efektivitas institusi politik, serta kredibilitas pemerintah membangun kepercayaan publik. Untuk mendorong partisipasi politik yang sehat dan produktif, diperlukan pendidikan politik, peningkatan kualitas demokrasi, dan pembenahan sistem politik yang terbuka, adil, dan responsif aspirasi masyarakat (Sumarto, 2025).

### **3. METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada bulan April 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui interaksi langsung dengan partisipan dan lingkungan sosial yang diteliti (Sugiyono, 2019). Pengumpulan data dengan wawancara terhadap Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Krembangan, unsur perangkat desa, masyarakat, serta kalangan pemuda. Sementara itu, responden dalam penelitian ini adalah para pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Kepala Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2025. Mereka dipilih untuk menggambarkan bagaimana persepsi dan

partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi tingkat desa, khususnya pemilihan kepala desa. Sumber data penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi peneliti dengan informan yang telah ditentukan. Peneliti berkomunikasi langsung dengan para informan di lokasi penelitian untuk menggali informasi yang relevan dan mendalam mengenai dinamika pelaksanaan pemilihan kepala desa. Data primer menjadi penting karena dapat memberikan gambaran nyata yang aktual mengenai fenomena yang sedang dikaji, terutama terkait aspek partisipasi masyarakat dan efektivitas pelaksanaan pemilihan di tingkat desa.

Teknik pengumpulan data yang digunakan bertujuan untuk memperoleh informasi yang tidak terbahasakan langsung atau tidak cukup hanya diperoleh melalui wawancara. Seperti pendapat Cresswell bahwa peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas di lokasi penelitian (Amrullah dkk., 2023), pengalaman yang berperan serta strategi lapangan secara simultan memadukan analisis dokumen, wawancara, partisipasi, observasi langsung, sekaligus dengan melakukan introspeksi. Dalam penelitian ini digunakan dua teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pemilihan kepala desa serta keterlibatan masyarakat di dalamnya, sedangkan wawancara yang mendalam digunakan untuk menggali pandangan, pengalaman, dan motivasi partisipan dalam menggunakan hak pilih.

Cresswell menjelaskan analisis data di penelitian kualitatif dilakukan dengan memproses data satu per satu yang telah dikumpulkan dan dicatat sebelumnya secara sistematis (Sarosa, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode analisis data model Miles dan Huberman. Bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga data yang diperoleh mencapai titik jenuh. Adapun tahapan dalam analisis data meliputi *data reduction* (reduksi data), yaitu proses penyederhanaan dan pemilahan data yang relevan; *data display* (penyajian data), yaitu penyajian data dalam bentuk naratif atau tabel agar mudah dipahami; serta *conclusion drawing* atau *verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi), yaitu tahap merumuskan makna dari data yang dianalisis.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Analisis difokuskan pada sikap dan perilaku politik masyarakat berkaitan dengan proses pelaksanaan Pilkades Desa Krembangan, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2025, dimulai sejak partisipasi masyarakat, masa pelaksanaan, serta pasca acara pemilihan.

Untuk menilai partisipasi politik masyarakat di Desa Krembangan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades), peneliti menggunakan konsep yang dikemukakan oleh Surbakti dalam Sastroatmodjo yang menyebutkan dua variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni kesadaran politik seseorang dan keyakinan politik terhadap pemerintah (Averus & Alfina, 2020). Partisipasi di dalam perencanaan merupakan bentuk keterlibatan masyarakat yang paling tinggi sebab rakyat ikut turut serta dalam pembuatan keputusan. Partisipasi ini mencakup aktivitas merumuskan tujuan, maksud serta sasaran, merumuskan program dan acara, menilai apakah program itu dapat mewujudkan tujuan, serta merencanakan dan menilai biaya beserta sumber pembiayaannya. Beberapa bentuk partisipasi tersebut antara lain: pertama, partisipasi dalam bentuk tenaga, yaitu partisipasi masyarakat yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha atau perjuangan yang dapat menunjang keberhasilan suatu acara. Kedua, partisipasi dalam bentuk uang, yaitu kontribusi masyarakat untuk memperlancar perjuangan atau usaha pencapaian tujuan program, biasanya berupa sumbangan sukarela dari sebagian atau seluruh warga untuk kegiatan tertentu. Ketiga, partisipasi dalam bentuk mal atau barang, yakni partisipasi masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk sumbangan alat, perlengkapan, atau peralatan kerja.

Selanjutnya, dalam perilaku pemilih pada Pemilihan Kepala Desa Krembangan Tahun 2022-2025, proses pemilihan menunjukkan warga menggunakan hak pilihnya berdasarkan pertimbangan yang rasional. Melalui wawancara dengan salah satu pemilih, Fadly (40 tahun), diketahui bahwa beliau memantapkan pilihan sebelum hari tenang dengan mempertimbangkan visi dan misi serta semangat dan komitmen calon kepala desa. Beliau memilih berdasarkan kesadaran dan hati nurani tanpa mempertimbangkan pemberian kandidat mana pun, termasuk dalam bentuk uang atau barang (amplop), mencerminkan perilaku politik yang independen dan bertanggung jawab.

Adapun proses pelaksanaan pemilihan kepala desa umumnya meliputi tahapan, seperti pembentukan panitia pemilihan, penetapan daftar pemilih, kampanye calon, dan pelaksanaan pemungutan suara (Pemerintah Indonesia, 2014). Setelah itu, hasil pemilihan akan diumumkan dan calon terpilih dilantik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapan pertama yaitu persiapan awal, dimulai dari pemerintah desa atau instansi terkait yang menetapkan jadwal pemilihan kepala desa dan membentuk panitia pemilihan kepala desa yang mana bertugas mengorganisir proses pemilihan. Tahapan kedua adalah sosialisasi, di mana panitia melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pemilihan, termasuk tanggal, tempat, dan tata cara pemilihan. Selanjutnya, calon kepala desa mendaftar dan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, seperti usia, pendidikan, dan dukungan masyarakat.

Kemudian, tahapan ketiga adalah penetapan calon. Panitia memverifikasi berkas-berkas pendaftaran calon untuk memastikan bahwa semua syarat terpenuhi. Setelah verifikasi, panitia menetapkan daftar calon kepala desa yang akan bertanding. Tahapan keempat yaitu penetapan daftar pemilih, di mana panitia menyusun daftar pemilih berdasarkan data penduduk yang valid dan diumumkan kepada masyarakat untuk mampu mendapatkan masukan dan perbaikan jika diperlukan. Tahapan kelima adalah kampanye, di mana calon kepala desa memperkenalkan diri dan program kerja kepada masyarakat, sedangkan panitia yang mengatur waktu dan tempat kampanye agar berjalan tertib dan sesuai ketentuan.

Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan pemungutan suara. Panitia menyiapkan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS), kotak suara, dan perlengkapan lain. Pada hari pemungutan suara, masyarakat datang ke TPS untuk memberikan suara. Proses ini melibatkan pengecekan identitas pemilih, pemberian surat suara, dan pemungutan suara. Setelah pemungutan suara selesai, panitia menghitung suara yang diperoleh masing-masing calon. Hasil penghitungan suara direkap dan diumumkan di tingkat desa. Jika tidak ada keberatan, maka panitia akan menetapkan hasil pemilihan dan melanjutkan ke tahapan pelantikan. Kepala desa terpilih dilantik oleh pihak yang berwenang, biasanya pemerintah daerah, sebagai simbol legitimasi pemerintahan desa hasil pilihan rakyat.

Hasil dari pemungutan suara menunjukkan bahwa pemilihan kepala desa ini berjalan dengan lancar, didukung partisipasi aktif masyarakat yang turut membantu panitia pelaksana Pilkades. Warga yang berhak memilih dalam pemilihan kepala desa adalah mereka yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar sebelumnya. Pemilihan ini merupakan bentuk perwujudan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung oleh masyarakat sebagai bagian dari sistem demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Adapun hasil pemungutan suara dalam pemilihan ini menunjukkan bahwa sebanyak 70% dari seluruh penduduk menggunakan hak pilihnya, sementara sisanya, yakni 30%, tidak turut serta. Jumlah perolehan suara Pemilihan Calon Kepala Desa Krembangan diselenggarakan pada hari Minggu, 26 Juli 2022, menjadi gambaran nyata partisipasi demokratis masyarakat desa dalam menentukan arah kepemimpinan lokal, seperti pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perolehan Suara Pemilihan Calon Kepala Desa Krembangan**

Nomor Urut	Nama Calon Kepala Desa	Hasil Pemungutan Suara
1.	M. Suherman	174
2.	Damri	839
3.	M. Zaini Efendi	645

4.	Sutrisno	842
5.	Akhmad Umar	500
<b>Jumlah</b>		3.000

Pada proses pemilihan Kepala Desa Krembangan tahun 2022, periode 2022 di Desa Krembangan Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo dimenangkan oleh Sutrisno nomor urut 4 dengan perolehan 842 suara. Calon nomor urut 2 atas nama Damri memperoleh 839 suara, nomor urut 3 atas nama M. Zaini Efendi memperoleh 645 suara, nomor urut 5 atas nama Akhmad Umar memperoleh 500 suara, dan nomor urut 1 atas nama M. Suherman memperoleh 174 suara. Jumlah dari seluruh pemungutan suara yang sah yaitu 3.000 orang.

Perilaku politik pada umumnya ditentukan faktor internal dari individu itu sendiri seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati dan oleh faktor eksternal (kondisi lingkungan) seperti kehidupan beragama, sosial, politik, dan sebagainya. Adapun di Desa Krembangan para masyarakat lebih memilih kepala desa yang lebih memahami ilmu agama. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum, di samping perilaku politik. Faktor politik merupakan sebab para pemilih tidak menggunakan hak pilihnya dikarenakan ketidakpercayaan pada Calon Kepala Desa seperti masyarakat tidak memahami visi misi dari calon itu tidak punya pandangan lain. Sebagian partisipasi aktifnya diperlihatkan dengan terang-terangan menyatakan dukungannya ke salah satu calon. Ada pula beberapa yang bersifat tertutup, tetapi membuktikan partisipasinya dengan mendatangi lokasi tempat pemungutan suara dan mencoblos gambar calon yang menjadi pilihannya pada saat hari yang ditentukan tiba. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa di sana sini masih ada beberapa kelemahan pada sistem penyelenggaraan. Kualitas calon Kepala Desa yang kadang kurang dapat memenuhi sebagian keinginan masyarakat, hingga pelaksanaan kampanye yang tidak bisa luput praktik-praktik yang dinilai kurang mencerminkan sebagai calon pemimpin yang bersih dan berkualitas baik dari kecakapan maupun moral spiritualnya, padahal hal ini penting demi mewujudkan pemerintahan desa yang demokratis dan terhindar dari praktik kolusi serta nepotisme. Bagi masyarakat yang sudah mulai maju dan kritis barangkali kondisi pemerintahan cenderung otoriter dan kurang terbuka itu dirasa kurang nyaman. Mereka memimpikan sosok pemimpin cenderung bersifat mengayomi, jujur, dan terbuka. Umumnya mereka mengharapkan adanya calon baru yang nantinya mendatangkan perubahan dan peningkatan di bidang kesejahteraan, sarana prasarana dan lingkungan sosial yang lebih nyaman.

Untuk meningkatkan pendidikan politik dan sosialisasi desa bisa mengadakan seminar, lokakarya, atau pelatihan pentingnya partisipasi dalam pemilihan umum (Suyono dkk., 2024). Mengintegrasikan pendidikan politik ke dalam kurikulum sekolah, terutama di sekolah tingkat

menengah dan atas. Mendorong organisasi masyarakat sipil untuk mampu berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Dengan langkah ini diharapkan masyarakat akan lebih memahami pentingnya partisipasi mereka dalam pemilihan kepala desa dan mendorong keterlibatan yang lebih aktif di masa mendatang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Partisipasi warga menunjukkan kecenderungan positif terhadap nilai-nilai demokrasi, dengan sebagian besar masyarakat yang menggunakan hak pilihnya secara sadar dan rasional berdasarkan visi, misi, dan integritas calon kepala desa. Proses pemilihan juga mencerminkan mekanisme demokratis yang relatif berjalan tertib meskipun masih ditemukan kelemahan, seperti kurangnya pemahaman terhadap visi-misi calon dan praktik kampanye yang belum sepenuhnya mencerminkan etika politik. Untuk itu, disarankan agar pemerintah desa bersama pihak terkait meningkatkan pendidikan politik warga melalui seminar, pelatihan, dan integrasi pendidikan politik dalam kurikulum sekolah serta menggandeng organisasi masyarakat sipil guna mendorong pemahaman dan keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses demokrasi tingkat desa di masa yang akan datang.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Amrullah, A. M., Citriadin, Y., & Thohri, M. (2023). Manajemen penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja guru pendidikan agama Islam di SMKN 1 Narmada Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 9(3). <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i3.5897>
- Apriyani, W., Adha, M. M., & Siswanto, E. (2024). Pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan kepala kampung Bakung Udik Kabupaten Tulang Bawang. *Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik*, 1(4), 66–86. <https://doi.org/10.62383/sosial.v1i4.858>
- Averus, A., & Alfina, D. (2020). Partisipasi politik dalam pemilihan kepala desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(3), 585–610. <https://dx.doi.org/10.25157/moderat.v6i3.3996>
- Gustomy, R. (2017). Partisipasi politik difabel di dua kota. *Indonesian Journal of Disability Studies*, 4(1), 51–62. <https://doi.org/10.21776/ub.ijds.2017.4.1.8>
- Pemerintah Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495.
- Pratama, C. (2018). Seleksi bakal calon kepala desa menggunakan metode Simple Additive Weighting (SAW) di Desa Teberau Panjang. *Jurnal Perencanaan, Sains dan Teknologi (JUPERSATEK)*, 1(2), 121–131. <https://ejournal.uniks.ac.id/index.php/JUPERSATEK/article/view/165>

- Rahmawati, N. A. (2016). Kepemimpinan Kepala Desa Jombangdelik Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik dalam mendorong partisipasi masyarakat pada pengelolaan lingkungan. *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/kmkn.v2n4.p%25p>
- Ramadani. (2017). Analisis pemilihan kepala desa serentak terhadap demokrasi lokal di Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang (Studi kasus pada Kantor Kepala Desa Tanjung Kabupaten Aceh Tamiang) [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Rosit, M., Al Katiri, J., & Rifansya, F. P. (2024). Penguatan literasi digital dalam meningkatkan kesadaran politik warga di Desa Kuripan Ciseeng Bogor. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(6). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPMWidina/article/view/996>
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. PT Kanisius.
- Sholikhah, A. (2014). Perilaku politik masyarakat dalam pemilihan kepala desa (Studi pada masyarakat Desa Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 8(1), 79–97. <https://doi.org/10.24090/komunika.v8i1.750>
- Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sumarto, H. S. (2025). Inovasi, partisipasi dan good governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suyono, S., Lestari, B. B., Ardhana, N. F., & Mollo, C. R. R. (2024). Peran pendidikan politik dalam menghadapi dinamika demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024 bagi masyarakat Desa Bohar Sidoarjo. *JIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(12), 14211–14218. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i12.6498>
- Wangga, M. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana partai politik sebagai badan hukum dalam tindak pidana korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(2), 255–278. <https://doi.org/10.32697/integritas.v4i2.179>
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi politik kader perempuan dalam bidang politik: Sebuah kajian teoritis. *JISIPOL | Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126–142. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/296>
- Widyatama, P. R., & Suhari. (2023). Penanaman nilai karakter cinta tanah air pada siswa di SMP PGRI 1 Buduran. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, dan Sosial (EMBISS)*, 3(2), 174–187. <https://www.embiss.com/index.php/embiss/article/view/213>